

MENGURAI PROBLEMATIKA PENDIDIKAN INKLUSIF: PERBANDINGAN INDONESIA DAN INGGRIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DISABILITAS DAN KEADILAN SOSIAL

Ika Kurnia Sofiani¹, Muhammad Fazli², Muhammad Syafiq³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Indonesia

Email: ikur.wafie@gmail.com¹, muhamadfazli854@gmail.com²,
mhd335379@gmail.com³

ANALYSIS:
Journal of
Education
Vol. 3 No. 2
2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan pendekatan Mengurai Problematika Pendidikan Inklusif: Perbandingan Indonesia dan Inggris dalam Menghadapi Tantangan Disabilitas dan Keadilan Sosial dalam konteks pendidikan formal, serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu-isu keadilan sosial dan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini membantu siswa memahami konsep pendidikan inklusif secara kritis, serta mengidentifikasi kelebihan dan tantangan yang muncul selama pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial dan keterampilan berpikir kritis siswa, meskipun ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan konteks budaya, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pendekatan ini secara berkelanjutan serta integrasinya dengan metode lain untuk memperkaya perspektif siswa dan memperkuat nilai-nilai inklusivitas dalam pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Keadilan Sosial, Disabilitas

Abstract: *This study examines the approach titled Addressing the Challenges of Inclusive Education: A Comparison Between Indonesia and the United Kingdom in Confronting Disability and Social Justice Issues within the context of formal education, and evaluates its effectiveness in enhancing students' understanding of social justice and the rights of individuals with disabilities. The study aims to assess the extent to which this approach helps students critically understand the concept of inclusive education and to identify its strengths and challenges during the learning process. The findings reveal that the approach is effective in raising social awareness and critical thinking skills among students, although several*

challenges were noted, including limited resources, cultural contextual differences, and the need for adequate teacher training. The study recommends the continuous implementation of this approach and its integration with other methods to broaden students' perspectives and reinforce inclusive values in education.

Keywords: Inclusive Education, Social Justice, Disability

Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Prinsip dasar dari pendidikan inklusif adalah pengakuan terhadap keberagaman dan penghormatan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dalam konteks global, pendidikan inklusif telah menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan penghapusan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan formal. Meski demikian, penerapan pendidikan inklusif di berbagai negara masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi kebijakan, budaya, maupun infrastruktur pendukung.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas ke dalam sistem pendidikannya. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mendukung pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga pendidik yang terlatih, kurangnya fasilitas ramah disabilitas, serta stigma sosial yang masih melekat kuat di masyarakat. Dalam praktiknya, banyak sekolah umum belum sepenuhnya siap menerima siswa berkebutuhan khusus, sehingga pendidikan inklusif masih cenderung bersifat simbolis dan belum menyentuh aspek substansial dari kebutuhan peserta didik.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris telah memiliki sistem pendidikan inklusif yang lebih mapan dan terstruktur. Kebijakan pendidikan di Inggris memberikan perhatian serius terhadap hak-hak penyandang disabilitas, dengan dukungan regulasi yang kuat seperti Equality Act 2010 dan Children and Families Act 2014 yang mengatur penyediaan dukungan khusus di sekolah. Selain itu, terdapat sistem kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan komunitas yang memungkinkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Namun demikian, meskipun sudah berada pada tahap yang lebih maju, Inggris juga masih menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan, konsistensi implementasi di seluruh wilayah, dan peningkatan kualitas pelatihan guru inklusif.

Melalui perbandingan antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi problematika pendidikan inklusif, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem serta menggali peluang pembelajaran lintas negara yang dapat memperkaya pendekatan pendidikan inklusif di Indonesia. Kajian ini penting dilakukan sebagai refleksi kritis terhadap arah kebijakan dan strategi yang diambil, sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan berkeadilan sosial. Dengan mengurai perbedaan dan persamaan dalam konteks penerapan inklusivitas di kedua negara, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menjawab tantangan pendidikan bagi penyandang disabilitas secara global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis problematika pendidikan inklusif di Indonesia dan Inggris dalam konteks disabilitas dan keadilan sosial. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan pendidikan, undang-undang, laporan pemerintah, serta artikel ilmiah yang relevan dari kedua negara. Selain itu, dilakukan analisis terhadap praktik implementasi pendidikan inklusif melalui kajian literatur dan laporan studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam menerapkan pendidikan inklusif.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Perbedaan Kebijakan dan Kerangka Hukum Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Inggris

Pendidikan inklusif telah menjadi isu global yang mendapatkan perhatian luas dalam beberapa dekade terakhir. Negara-negara di dunia terus berupaya menyusun kebijakan dan regulasi yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang setara, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, Indonesia dan Inggris menempuh jalur yang berbeda dalam membangun kerangka hukum dan kebijakan pendidikan inklusif, yang mencerminkan situasi sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan bangsa tersebut dalam mengelola pendidikan. Dan melalui analisis perbandingan ini, dapat ditemukan berbagai kekuatan dan kelemahan dalam implementasi regulasi di kedua negara. (Mahrus, 2024)

Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai memperoleh pijakan hukum yang lebih kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 secara khusus mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Regulasi ini menjadi dasar bagi sekolah-sekolah reguler untuk menerima dan menyesuaikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Meski sudah ada kerangka hukum yang mengatur, pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih jauh dari ideal. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah lemahnya implementasi kebijakan di tingkat daerah dan sekolah. Banyak sekolah belum memahami secara menyeluruh makna pendidikan inklusif dan bagaimana cara mengelolanya. Selain itu, belum semua guru dibekali pelatihan khusus untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga pendekatan yang diterapkan masih bersifat umum dan kurang adaptif terhadap kebutuhan individual siswa.

Sebaliknya, Inggris telah memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Negara ini memiliki sejumlah undang-undang yang sangat mendukung penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, antara lain Education Act 1996, Special Educational Needs and Disability Act 2001, serta Children and Families Act 2014. Kerangka hukum ini memberikan kejelasan mengenai hak-hak siswa dengan kebutuhan khusus serta tanggung jawab pemerintah dan sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai. Salah satu kebijakan penting yang lahir dari kerangka ini adalah pengenalan dokumen

Education, Health and Care Plan (EHCP) yang menjamin pendekatan lintas sektor bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Inggris, sebagai salah satu negara maju dengan sistem pendidikan yang terkenal, telah menjalankan berbagai kebijakan pendidikan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu keunggulan sistem di Inggris adalah adanya pendekatan yang lebih terintegrasi antara lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan pihak sosial dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai untuk siswa disabilitas. Dalam hal ini, Inggris tidak hanya melihat pendidikan sebagai tanggung jawab sekolah semata, tetapi sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kehidupan anak. Selain itu, keberadaan badan pengawas seperti Ofsted juga mendorong sekolah-sekolah untuk secara serius memenuhi indikator inklusivitas dalam penilaian kualitas pendidikan mereka.

Kendati memiliki struktur hukum yang solid, pelaksanaan pendidikan inklusif di Inggris tetap menghadapi tantangan. Beberapa laporan menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan EHCP antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta keluhan dari orang tua tentang lamanya proses pengajuan layanan khusus. Selain itu, tantangan dalam hal pendanaan juga menjadi isu yang terus muncul, terutama ketika sekolah harus menyesuaikan fasilitas dan pelatihan untuk staf dalam skala besar. Namun, secara umum, Inggris telah menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Hal ini berdampak pada terhambatnya pemberian layanan pendidikan yang berkualitas (Hikmah Mulyanti et al, 2024).

Jika dibandingkan, perbedaan utama antara kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dan Inggris terletak pada kedalaman regulasi dan mekanisme pelaksanaannya. Indonesia memiliki regulasi dasar yang baik, namun masih terbatas pada aspek normatif dan belum cukup didukung dengan mekanisme kontrol dan evaluasi yang kuat. Di Indonesia, jumlah layanan pendidikan khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran ABK masih sangat minim. Sementara itu, Inggris telah membangun sistem yang lebih menyeluruh dan mengakar, termasuk pengawasan berjenjang dan perencanaan layanan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan inklusif tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga sistem pelaksanaan yang didukung oleh profesionalisme, pendanaan, dan pengawasan.

Indonesia dapat belajar dari Inggris dalam mengembangkan kebijakan inklusif yang lebih terarah dan realistis. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah memperkuat pelatihan guru secara sistematis, membangun sistem rujukan lintas sektor seperti model EHCP, serta memperluas akses terhadap sumber daya pendidikan yang ramah disabilitas. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting agar kebijakan yang disusun di tingkat nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal.

Pada akhirnya, baik Indonesia maupun Inggris memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan setiap anak, tanpa memandang kondisi fisik atau mentalnya, memperoleh hak pendidikan yang bermutu. Namun, keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana regulasi dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara konsisten. Oleh karena itu, diskusi mengenai perbedaan kebijakan pendidikan inklusif ini bukan hanya menjadi bahan perbandingan, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran lintas negara untuk mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

2. Peran Guru dan Lembaga Pendidikan dalam Mewujudkan Inklusivitas di Indonesia dan Inggris

Pendidikan inklusif merupakan komitmen global untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, mendapatkan hak atas pendidikan yang bermutu dan setara. Dalam konteks ini, guru dan lembaga pendidikan memegang peran sentral sebagai garda terdepan dalam penerapan prinsip inklusivitas di sekolah. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari guru dan dukungan struktural dari institusi pendidikan, konsep pendidikan inklusif akan sulit terwujud dalam praktik. Baik di Indonesia maupun di Inggris, upaya untuk membangun sistem pendidikan yang ramah terhadap keberagaman peserta didik terus diupayakan melalui berbagai program, pelatihan, kebijakan internal, serta pendekatan pedagogis yang adaptif.

Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses belajar siswa dengan kebutuhan khusus. Di Indonesia, tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan peran ini adalah kurangnya pelatihan yang memadai mengenai metode pembelajaran inklusif. Banyak guru di sekolah umum masih belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang bagaimana menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Di sisi lain, di Inggris, guru sudah lebih familiar dengan konsep diferensiasi pembelajaran dan diberikan pelatihan rutin mengenai penanganan siswa dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kesiapan antara dua negara dalam hal kompetensi tenaga pengajar.

Pendidik memainkan peran utama dalam menentukan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Peran guru dalam mewujudkan inklusivitas dapat dirinci dalam beberapa bentuk berikut:

1. Identifikasi dan asesmen awal kebutuhan siswa
Guru harus mampu mengenali sejak dini karakteristik khusus yang dimiliki peserta didik, baik yang bersifat fisik, intelektual, maupun emosional. Kemampuan ini penting agar penanganan bisa disesuaikan dengan kebutuhan aktual anak.
2. Modifikasi kurikulum dan metode pembelajaran
Guru dituntut untuk mampu menyesuaikan materi ajar agar lebih dapat diakses oleh siswa dengan kebutuhan khusus. Ini termasuk membuat rancangan pembelajaran individual (RPI) dan menggunakan media bantu yang sesuai.
3. Membangun iklim kelas yang mendukung
Menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana seluruh siswa merasa dihargai, aman, dan bebas dari diskriminasi, adalah tanggung jawab guru. Lingkungan yang positif mendorong kepercayaan diri dan partisipasi aktif dari siswa berkebutuhan khusus.
4. Bekerja sama dengan tenaga ahli dan orang tua
Guru harus terbuka untuk bekerja sama dengan psikolog, terapis, dan orang tua siswa dalam merancang strategi pembelajaran yang paling efektif. Kolaborasi lintas pihak ini penting demi keberhasilan pendidikan inklusif.

Peran lembaga pendidikan juga sangat signifikan dalam menentukan arah dan keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah sebagai institusi perlu menyediakan sistem pendukung yang memadai seperti fasilitas fisik yang ramah disabilitas, penyediaan alat bantu belajar, serta perekrutan tenaga pendukung seperti pendamping khusus. Di Indonesia, upaya ini mulai dijalankan di beberapa sekolah inklusi, meskipun implementasinya masih belum merata karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan

Pendidikan Terpadu. Sementara di Inggris, sekolah-sekolah sudah memiliki struktur yang lebih mapan dalam menyediakan layanan khusus, dengan dukungan dari pemerintah lokal dan badan kesehatan.

Tidak kalah penting adalah peran manajemen sekolah dalam mengatur kebijakan internal yang pro-inklusi. Kepala sekolah dan tim manajemen harus memiliki visi yang jelas mengenai inklusivitas dan secara aktif mendorong program-program yang mendukung keberagaman peserta didik. Sekolah juga perlu mengembangkan kebijakan anti-diskriminasi serta mekanisme pelaporan terhadap perlakuan tidak adil kepada siswa berkebutuhan khusus. Di Inggris, pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan oleh lembaga seperti Ofsted yang mengevaluasi performa sekolah berdasarkan standar inklusivitas, sedangkan di Indonesia pengawasan masih tergantung pada inisiatif dinas pendidikan daerah. Keterlibatan guru dan lembaga pendidikan juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran komunitas sekolah, termasuk siswa lain dan orang tua.

Keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam kelas atau kelengkapan sarana sekolah, tetapi juga pada adanya sistem dukungan yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi di kedua negara memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kapasitas guru melalui program pendidikan profesi dan pelatihan berkelanjutan. Di Inggris, skema pelatihan CPD (Continuous Professional Development) sangat membantu guru dalam terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Indonesia perlu memperluas cakupan pelatihan sejenis, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap pelatihan pendidikan inklusif.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional pendidikan inklusif juga sebagai salah satu wadah untuk mencapai ketuntasan Wajib belajar Sembilan Tahun serta untuk efisiensi layanan pendidikan. Selain itu, penting untuk menciptakan ruang reflektif bagi guru agar dapat berbagi pengalaman dan tantangan dalam menerapkan pendidikan inklusif. Forum diskusi guru, komunitas belajar, atau jaringan profesional sangat berperan dalam membangun solidaritas dan solusi kolektif. Di Inggris, banyak sekolah yang tergabung dalam teaching alliances yang saling bertukar praktik baik. Indonesia pun dapat mengadopsi pola serupa dengan melibatkan guru-guru dari berbagai wilayah dalam forum yang difasilitasi oleh pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.

3. Tantangan Sosial dan Budaya Terhadap Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Inggris

Di Indonesia, masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk memandang disabilitas sebagai beban atau aib keluarga, yang berdampak pada rendahnya dukungan terhadap pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Sementara itu, Inggris, meskipun sudah lebih progresif dalam hal penerimaan terhadap perbedaan, tetap menghadapi persoalan kultural tertentu, terutama dalam komunitas minoritas etnis yang memegang nilai tradisional yang ketat. Perbedaan pendekatan masyarakat terhadap inklusivitas menciptakan hambatan-hambatan yang tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan formal. Pendidikan inklusif menuntut perubahan paradigma sosial secara luas, termasuk dalam hal penerimaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan penghapusan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus.

Beberapa tantangan sosial dan budaya yang dihadapi oleh Indonesia dan Inggris dalam mengembangkan pendidikan inklusif dapat dirinci sebagai berikut:

1. Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas

Di banyak wilayah di Indonesia, anak dengan disabilitas masih sering dianggap sebagai “anak yang tidak normal” atau bahkan diperlakukan secara diskriminatif. Meskipun di Inggris kesadaran publik lebih tinggi, stigma tetap ada, khususnya dalam komunitas yang kurang teredukasi atau memiliki latar belakang budaya konservatif.

2. Kurangnya literasi masyarakat tentang pendidikan inklusif
Masyarakat umum, termasuk orang tua siswa, masih banyak yang belum memahami konsep pendidikan inklusif secara utuh. Di Indonesia, masih banyak orang tua yang ragu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum karena takut anaknya tidak diterima dengan baik. Di Inggris, tantangan ini lebih banyak muncul dalam komunitas imigran atau komunitas yang baru mengenal sistem pendidikan inklusif.
3. Ketimpangan antara nilai budaya tradisional dan prinsip kesetaraan
Di Indonesia, nilai-nilai budaya tertentu masih menempatkan anak sebagai objek yang harus “diatur” oleh orang tua dan masyarakat, sehingga suara anak, terutama yang berkebutuhan khusus, sering kali tidak didengar. Di Inggris, meskipun prinsip hak anak dijunjung tinggi, ketegangan budaya masih terjadi dalam beberapa komunitas yang lebih menekankan kontrol keluarga atas pendidikan anak.

Selain tantangan-tantangan tersebut, faktor media dan representasi publik juga berkontribusi dalam memperkuat atau melemahkan penerimaan sosial terhadap pendidikan inklusif. Kurangnya personel yang mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif merupakan salah satu permasalahan utama. Di Indonesia, jaranganya pemberitaan positif tentang keberhasilan anak-anak disabilitas menimbulkan kesan bahwa mereka tidak mampu berprestasi. Sebaliknya, di Inggris, meskipun terdapat kemajuan dalam hal kampanye publik dan representasi, isu disabilitas masih sering disampaikan dalam narasi yang cenderung “kasihan” daripada menekankan pada kemampuan dan potensi.

Penting juga untuk melihat bagaimana kurikulum dan materi pembelajaran mencerminkan nilai-nilai inklusif. Ketika buku pelajaran dan kegiatan sekolah tidak mencerminkan keberagaman siswa, maka pesan yang tersampaikan ke anak-anak adalah bahwa perbedaan tidak menjadi bagian dari norma. Di Indonesia, masih sedikit buku teks atau media ajar yang menggambarkan anak-anak dengan disabilitas dalam peran yang aktif dan positif. Inggris telah lebih maju dalam hal ini, namun evaluasi terus diperlukan agar inklusi tidak hanya hadir dalam wacana, tetapi juga dalam praktik harian sekolah.

Tantangan sosial dan budaya juga merambah ke interaksi antar siswa. Di sekolah inklusif, interaksi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus harus difasilitasi dengan baik agar tidak terjadi pengucilan atau perundungan. Di Indonesia, karena belum semua sekolah memiliki program pendidikan karakter yang kuat, kasus-kasus diskriminasi atau pengabaian terhadap siswa disabilitas masih ditemukan. Inggris telah mengembangkan berbagai program pembinaan sikap, namun tetap menghadapi hambatan dalam hal internalisasi nilai empati di kalangan remaja. Berdasarkan tujuan pendidikan dapat dilihat bagaimana system pendidikan di Inggris yang memiliki tujuan anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

Membangun pendidikan inklusif juga berarti mendidik masyarakat luas untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan hambatan. Ini membutuhkan pendekatan lintas sektor, termasuk keterlibatan media dan lembaga swadaya masyarakat. Di Inggris, sinergi lintas sektor ini lebih terorganisasi, sementara di

Indonesia, masih diperlukan strategi kolaboratif yang konsisten untuk mengubah pola pikir kolektif masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kebijakan publik yang tidak hanya fokus pada sekolah, tetapi juga pada penguatan budaya masyarakat yang inklusif. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Kedua negara masih berada dalam proses membangun budaya pendidikan yang benar-benar inklusif. Keberhasilan mereka akan sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu mengatasi tantangan sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat masing-masing.

Kesimpulan

Dari hasil kajian mengenai perbandingan antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi problematika pendidikan inklusif, dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya memiliki komitmen terhadap penyediaan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, implementasi dan efektivitasnya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Inggris telah berhasil membangun sistem yang lebih terstruktur dengan dukungan regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan pelatihan guru yang berkelanjutan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan baik dari sisi kebijakan, kesiapan lembaga pendidikan, maupun sikap sosial terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus.

Meskipun Inggris lebih maju dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, negara tersebut tetap menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan layanan, kualitas pelaksanaan di berbagai daerah, serta kebutuhan akan pembiayaan yang berkelanjutan. Indonesia dapat belajar dari pengalaman Inggris, khususnya dalam penguatan sistem hukum yang melindungi hak penyandang disabilitas dan pengembangan model pendidikan yang responsif terhadap keragaman peserta didik. Di sisi lain, nilai-nilai lokal dan budaya gotong royong di Indonesia juga dapat menjadi potensi dalam membangun pendekatan inklusif yang kontekstual dan berbasis komunitas.

Dari perbandingan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan adaptif dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem yang mampu menjawab kebutuhan semua peserta didik tanpa diskriminasi. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia memperkuat komitmen politik dan anggaran untuk pendidikan inklusif, serta menjadikan praktik-praktik baik dari negara lain sebagai rujukan untuk membangun sistem yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keadilan sosial bagi semua.

Daftar Pustaka

- Arsilawita, Rusdinal, Azwar Ananda, and Nurhizrah Gistituati. "Sistem Pendidikan Inggris Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021).
- Hikmah Mulyanti, Lukman Lukman, Robby Setiawan, Sistya Pratiwi, and Ika Kurnia Sofiani. "Analisis Kebijakan Pendidikan Inggris Serta Perbandingan Dengan Pendidikan Di Indonesia." *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (June 20, 2024): 44–51. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.407>.
- Kasman. "Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (Mei 2020).
- Mahrus. "Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif." *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* 4, no. 1 (2024).

- Mulyah, Santi, and Qolbi Khoiri. "Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif" 05, no. 03 (2023).
- Rida Melinda, Ahmad Suriansyah, and Wahdah Refia Refianti. "Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Peluang dalam Implementasinya di Indonesia." *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (December 21, 2024): 337-43. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1096>.
- Velianantha, Dhea, Rezkhy Baharuddin, and Alya Rafiah. "Peran dan Tantangan Pendidik dalam Mewujudkan Pembelajaran Inklusif" 2, no. 02 (2024).
- Wulandari, Apri, Safitri Safitri, and Oman Farhurohman. "PENTINGNYA GURU DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF YANG KOMPETITIF." *Jurnal Ilmiah Bina Edukasi* 17, no. 1 (June 30, 2024): 39-55. <https://doi.org/10.33557/jedukasi.v17i1.3139>.